

## **Reaksi Kaum Nasionalis Maluku Dalam Menghadapi Rencana Van Mook Membentuk Negara Federal**

[Sem Touwe, H. A. Sobana Hardjasaputra,  
Hj. Nina H.Lubis, Susanto Zuhdi]

### **Abstrak**

Dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana reaksi kamu nasionalis Maluku dalam menghadapi rencana pembentukan negara federal yang dimotori oleh van Mook? Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena sebagai ujian utama kaum nasionalis mempertahankan NKRI. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, penulis menerapkan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk keperluan eksplanasi, dalam tulisan ini akan digunakan konsep nasionalisme menurut Otto Bauer (1907: 1-3) yang melihat sebagai suatu gerakan moral untuk menuju pembentukan suatu bangsa dengan mewujudkan arti lebih pada kehendak untuk hidup bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalannya kaum nasionalis bersama rakyat Maluku menentang rencana pembentukan negara federal yang dilontarkan oleh van Mook. Namun demikian, terdapat segelintir tokoh Maluku yang masih menunjukkan kesetiaan abadi kepada Belanda sehingga mendukung rencana van Mook membentuk negara federal. Namun demikian, secara luas, di kalangan rakyat Maluku terdapat keinginan untuk membentuk satu bangsa yang merdeka di bawah naungan NKRI yang terlepas dari hubungan politik dengan Kerajaan Belanda.

### **Abstract**

*In this paper will consider how you react in the face of nationalist Maluku formation of a federal state plan that was driven by van Mook? Issues are important to study because as a major test of the nationalists retain Homeland. In order to answer these questions, the authors apply the historical method consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. For purposes of explanation, in this paper will use the concept of nationalism under Otto Bauer (1907: 1-3) who saw as a moral movement towards the establishment of a nation to bring more meaning to the will to live together.*

*The results showed that the way of the nationalists with the people of Maluku oppose the plan for federalism posed by van Mook. However, there are still a handful of Maluku figures show undying loyalty to the Dutch van Mook thus supporting the plan to form a federal state. However, broadly, among the people of Maluku there is a desire to establish an independent nation under the auspices of Homeland regardless of political relations with the Kingdom of the Netherlands*

## **1. PENDAHULUAN**

Ketika Jepang melakukan penyerangan ke Indonesia, banyak personil pemerintah Hindia Belanda yang lolos ke Australia termasuk van Mook. Ratu Belanda yang berada di Inggris tempat pengasingan mengangkat van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal dalam pengasingan, karena Gubernur Jenderal Belanda

Tjarda van Stakenbor Stachower telah menyerah kepada pasukan Jepang. Dari tempat pengasingan di Australia van Mook mengajukan usul kepada pemerintah Belanda agar melakukan pendekatan dengan pihak republik Indonesia untuk membentuk kabinet campuran Belanda-Indonesia.

Usul van Mook tidak ditanggapi oleh Ratu Belanda di London, bahkan pada tanggal 25 Mei 1942 jabatan van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal berakhir dan diangkat dalam jabatan yang baru sebagai Menteri Jajahan dalam pengasingan. Bulan September 1945 menjelang ia kembali ke Indonesia, nama jabatan ini diubah menjadi Menteri Seberangan Lautan dan ketika ia berada di Indonesia bersama pasukan Sekutu khususnya tentara Australia, ia kembali diberhentikan dari jabatan itu karena mendapat jabatan baru sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jabatan baru yang diberikan kepada van Mook di Indonesia bertepatan dengan pidato Ratu Belanda pada tanggal 6 Desember 1942. Dalam pidato yang disampaikan oleh Ratu Wilhelmina itu, ia mengatakan, bahwa :

*I visualize, without anticipating the recommendations of the future conference, that they will be directed towards a commonwealth in which the Netherlands, Indonesia, Suriname, and Curacao will participate, with complete self-reliance and freedom of conduct for each part regarding its internal affairs, but with the readiness to render mutual assistance. It is my opinion that such a combination of independence and collaboration can give the Kingdom and its parts the strength to carry fully their responsibility, both internally and externally. This would leave no room for discrimination according to race or nationally, only the ability of the individual citizens and the needs of the various groups of the population will determine the policy of the government (van Mook, 1949 : 13).*

Di sisi yang lain H. J. van Mook berpendapat bahwa langkah pertama setelah semua tentara Jepang dikembalikan ke negerinya adalah mempertahankan (*maintenance*) dan melakukan ekspansi bagi demokrasi yang nyata, dan membuat langkah-langkah untuk mencapai persahabatan dan saling pengertian antara dunia barat dan dunia timur. Van Mook dalam pidatonya di depan UNICIO, San Francisco tanggal 18 Mei 1945, menekankan bahwa berdasarkan keputusan yang sudah dibuat kerajaan itu; “saya hanya memberikan solusi bahwa keputusan terakhir diserahkan kepada rakyat Belanda, Indonesia, Suriname, dan Curacao.” Ia menambahkan bahwa mungkin bisa dipastikan keempat komponen Belanda, Indonesia, Suriname, dan Curaco itu akan memiliki otonomi intern dan lembaga perwakilan sendiri. Pemerintah pusat kerajaan semestinya terdiri dari sebuah kementerian dan lembaga perwakilan yang mewakili keempat bagian, atau mungkin berupa lembaga perwakilan yang mewakili badan-badan preadil regional (van Mook, 1949: 13).

Konsep inti dari sistim *federal* van Mook tetap menyentuh pengaturan distribusi kekuasaan, tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintahan di daerah. Van Mook menginginkan semakin besarnya kekuasaan pemerintah negara bagian dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, Namun hal ini baru bisa dilaksanakan kalau kekuasaan telah sepenuhnya berada di tangan Belanda. Di masa Revolusi Konsepsi Federal van Mook lebih banyak ditujukan untuk mengasingkan Pemerintah Republik Indonesia dari wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dengan cara pengepungan melalui pembentukan negara bagian yang otonom. Usaha ke arah merealisasi konsepsi van Mook sudah dimulai sejak ia kembali ke Indonesia akhir tahun 1945.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif (Gottschalk, 1985: 32). Tahapan pertama dari metode sejarah adalah *heuristik* yakni proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Tahap kedua adalah kritik terhadap sumber, baik secara ekstern (otentisitas sumber) maupun intern (kredibilitas sumber). Tahap ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi yakni proses menafsirkan berbagai fakta baik secara verbal, teknis, faktual, logis, maupun psikologis. Tahapan terakhir dari metode sejarah adalah historiografi yakni proses penulisan peristiwa masa lampau menjadi sebuah kisah sejarah yang kronologis dan imajinatif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Gagasan van Mook Membentuk Negara Federal**

Tanggal 10 Oktober 1945, Panglima Sekutu di Asia Tenggara Jenderal Mounbatten memanggil van Mook ke Singapura untuk mengadakan suatu pertemuan khusus. Dalam pertemuan itu van Mook mendesak Mounbatten untuk segera menduduki seluruh pulau Jawa dan Sumatra, namun sebelum hal itu dilaksanakan Mounbatten “memaksa” van Mook untuk berdialog dengan Sukarno dan Hatta. Dengan saling pengertian itu, tentara Inggris mulai tanggal 15 Oktober bergerak dari Jakarta, menuju Bogor, Bandung dan mendarat di Surabaya dan Semarang. Tanggal 6 Nopember 1945, H.J. van Mook mengumumkan langkah politiknya dengan sebutan “*a turning point*” (titik balik) yang berisi pengakuan terhadap penentuan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia benar-benar harus direalisasikan oleh pemerintah Belanda. walaupun Komandan Pasukan Sekutu/Inggris di Indonesia menyebutkan pernyataan van Mook itu sebagai

“*excellent document*”, tetapi jelas bahwa van Mook menganggap kemerdekaan Republik Indonesia itu belum ada (Cheong, 1982 : 63-64).

Setelah itu Van Mook berangkat ke Belanda mengadakan pembicaraan dengan Kabinet Belanda yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 1945. Setelah itu van Mook memantapkan laporan dan usul kongkritnya kepada Kabinet Belanda pada tanggal 25 November 1945 mengenai ide negara federal yang ia inginkan dengan basis etnis dan tetap pada pormasi adanya Gubernur Jenderal sebagai pengikat semua negara-negara bagian. Prof. Sartono Kartodirdjo menyebut gagasan van Mook ini sebagai *Eilandenrijk* atau negara kepulauan yang menurut beliau hanya ingin mempertahankan regionalisme dengan basis etnisitasnya, namun di pihak lain hegemoni penguasa kolonial masih dipertahankan. *Eilandenrijk* ini mengarah kepada segregasi yang permanen yang tidak mendorong integrasi (Kartodirdjo, 1992: 54-56).

Kepada Kabinet Belanda van Mook mengajukan proposal “agar Indonesia diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri setelah suatu masa transisi, dan Dalam masa transisi itu Belanda masih bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi dan politik luar negeri. Untuk itu ia mengajukan format negara *federal* yang menjamin otonomi bagian-bagian masyarakat Indonesia berdasarkan etnis”. Negara federal itu akan menjadi teman kerja (*partner*) dari Belanda, dan akan menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian dasar pemikiran van Mook sebenarnya adalah perwujudan *desentralisasi* dalam kesatuan etnisitas yang otonom, dan satu sama lain diikat dalam kerangka negara *federal* (Kartodirdjo, 1992: 66 ).

Pemikiran ini merupakan *milestone* (tonggak batas) dari gagasan van Mook sehingga dalam beberapa kesempatan kemudian van Mook membungkus gagasan federalnya itu dengan menyebutkan bahwa tujuan negara *federal* itu adalah untuk menghindari dominasi Jawa terhadap luar Jawa. Kalau seluruhnya dipersatukan dengan Jawa ia akan menjadi rapuh (*fragile*) karena dominasi Jawa tidak akan bisa menjamin kebebasan beragama dan kepentingan etnis lain dan kelompok minoritas. Secara umum perbedaan sistem *federal* dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya terletak pada rumusan pemerintahan tidak langsung antara kekuasaan pemerintah pusat dengan kekuasaan lokal yang berdasarkan etnis, dan dipuncak kekuasaan itu pengaruh kuat Belanda dilaksanakan secara terselubung dan halus. Untuk itu perlu diciptakan suasana ketergantungan akan bantuan polisi dan militer Belanda, sehingga pemerintahan itu baik lokal maupun nasional tidak akan langgeng tanpa mereka.

Di sisi yang lain kabinet Belanda di bawah Perdana Menteri W. Schermerhorn mendapat tekanan dari para menterinya, seperti J. M. de Boy (Menteri Angkatan

Laut dan Perkapalan); P. Lieftinch (Menteri Keuangan); dan J. H. van Royen (Menteri Negara) pada pertemuan tanggal 25 November 1945 di negeri Belanda agar tidak langsung menerima gagasan van Mook. Untuk mengatasi perbedaan itu, sebuah komisi dibentuk oleh Perdana Menteri sendiri, yang beranggotakan para menteri, Drees, van Royen, Logemann, de Booy, Lieftinch, dan Beel. Komisi itu ternyata menerima proposal van Mook tentang negara federal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal, dan akan menjadi negara persemakmuran di bawah koordinasi Belanda (Cheong, 1982 : 67-68).

Hasil komisi dikonsultasikan dengan Pemerintah Inggris di *Chequers* tanggal 27 Desember 1945. Dalam pertemuan itu disepakati agar konflik Republik Indonesia dengan Belanda diselesaikan lewat perundingan. Parlemen Belanda kemudian memberikan persetujuan, dan pada tanggal 25 Januari 1946 H.J. van Mook kembali ke Indonesia. Tanggal 10 Pebruari 1946 Letnan Gubernur Jenderal Belanda itu secara resmi mengajukan proposalnya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tawaran itu tidak segera ditanggapi oleh pihak republi karena saat itu sedang terjadi peperangan hampir disetiap daerah menghadapi sekutu maupun kebijakan NICA yang menyuluh api revolusi semakin membarah

## **B. Perjanjian Linggarjati: Langkah Awal Belanda Menuju Federalis**

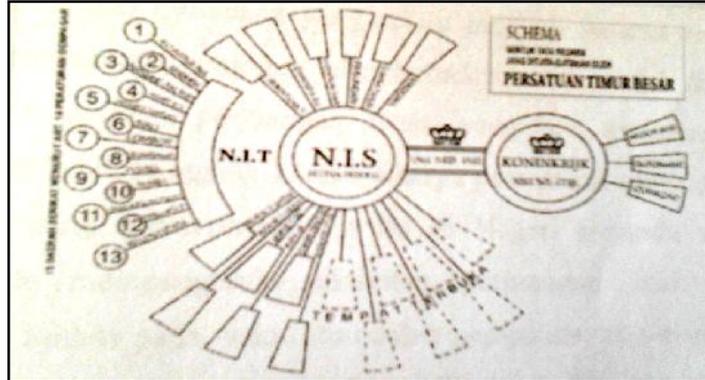
Sejarawan Belanda P.M.H. Groen mengatakan bahwa kesalahan strategi militer Belanda disebabkan oleh penafsiran terlalu tinggi atas kemampuan militer Belanda, dan meremehkan kekuatan militer Republik dalam penyusunan pelaksanaan gerilya, serta memuncaknya rasa nasionalisme, dan dukungan rakyat Indonesia terhadap Republik. Kesalahan ini menyebabkan kebuntuan lapangan militer yang harus ditutup dengan perundingan. Tentara Belanda saat itu sangat tergantung pada tentara Sekutu/Inggris yang tentu saja memiliki perhitungan dan kepentingan sendiri pula. Inggris memang berusaha untuk tidak berhadapan langsung dengan rakyat Indonesia, khususnya setelah pengalaman buruk mereka dengan Pertempuran Surabaya, Ambarawa, Palembang, dan sebagainya. Karena itu Inggris hanya memilih daerah kunci (*key-area strategy*) dan pada waktu yang bersamaan mendorong Belanda untuk berunding dengan pihak Republik (Groen, 1991: 345-346).

Upaya pertemuan van Mook dengan Sjahrir berhasil diadakan tanggal 12 dan 23 Pebruari 1946, setelah itu dihentikan karena Perdana Menteri Sjahrir harus berkonsentrasi pada politik dalam negeri, karena adanya Sidang Pleno KNIP di Solo. Pertemuan baru dilanjutkan lagi tanggal 17 Maret 1946 setelah presiden Soekarno dan wakilnya Bung Hatta menunjuk kembali Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Pertemuan Syahrir dengan pihak Belanda selalu diikuti dengan pertimbangan politik mengenai situasi yang sementara dihadapi oleh masyarakat

setelah tentara Inggris di tarik dari Indonesia tanggal 28 Pebruari 1946 dan terjadi berbagai pertempuran diantaranya Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi Selatan Sulawesi Utara, Serta Maluku (Zara M., 2009: 120-121).

Muara dari upaya pendekatan ini adalah Perundingan Hoge Veluwe yang berlangsung di Negeri Belanda pada tanggal 14-15 April 1946, namun dianggap gagal karena tidak menghasilkan kesepakatan. (Lapian dan Drooglever, 1992 : 235). Situasi ini mendorong Belanda untuk membentuk Komisi Jenderal yang akan melakukan perundingan langsung dengan Republik. Kehadiran Komisi Jenderal ini membuktikan bahwa kebijaksanaan van Mook dalam menangani masalah Indonesia masih dipertanyakan Pemerintah Belanda. Pembicaraan antara Pemerintahan Sjahrir dengan Komisi Jenderal Belanda diadakan di Linggarjati dan difasilitasi oleh Inggris itu akhirnya menghasilkan rumusan Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 15 Nopember wakil-wakil Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia menandatangani persetujuan Linggarjati dan kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berbentuk Federal, meliputi wilayah-wilayah republik dan non republik (Margarets, 1986: 95).

Dalam surat kabar *Negara Baroe*, harian untuk Negara Indonesia Timur tanggal 8 Pebruari 1947 dijelaskan bahwa; pada konferensi Linggarjati diperoleh kesepakatan antara pihak Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda yang sama-sama mengakui adanya Negara Indonesia Serikat yang meliputi Negara Indonesia Timur, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Dijelaskan pula bahwa dalam dua tahun Negara Indonesia serikat sudah harus terbentuk dengan susunan pemerintahan sendiri dan kemudian harus mengadakan kerjasama dengan kerajaan Nederland yang akan disebut “Uni Indonesia Belanda” (*Negara Baroe*, 8 Pebruari 1947). Tawaran pembentukan “Uni Indonesia Belanda seperti yang di cita-citakan oleh van Mook maupun pemerintah Belanda memiliki bentuk seperti yang ada pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1.**  
**Skema Bentuk Negara**  
**Yang Di Cita-Citakan Oleh**  
**Persatuan Timur Besar**

**Sumber:** *Algemeen Rijksarrchief, Twede Afdeling Repportage Indonesia 1945-1950 No : 770.*

Dari skema di atas, penulis dapat menganalisa bahwa ada tempat terbuka yang disediakan bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda untuk menggabungkan diri dalam Uni Indonesia Belanda. Dari skema diatas juga dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah Belanda menginginkan supaya Indonesia tetap berada di dalam gengaman kekuasaannya tanpa menghiraukan semangat nasionalisme yang semakin terfokus diantara para pejuang revolusioner untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Analisa ini didasarkan pada beberapa pasal yang dibuat oleh pihak pemerintah Belanda untuk mengikat Republik Indonesia terutama dua pasal yang penting dari perjanjian Linggarjati yaitu rumusan Pasal 2 dan Pasal 4. Pasal 2 berisi tentang Pemerintah Indonesia dan Belanda bersama-sama akan membentuk suatu negara demokrasi *federal* yang berdaulat, yaitu Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tiga negara bagian, yaitu Republik Indonesia, negara bagian Kalimantan, dan negara bagian Indonesia Timur, sedangkan Pasal 4 menjelaskan bahwa Republik Indonesia Serikat itu akan dibentuk sebelum tanggal 1 Januari 1949 (Cheong, 1982 : 64).

Strategi diplomasi dari Pemerintah, dalam hal ini kabinet Sjahrir pada waktu itu selalu mendapat pertanyaan mengapa Sjahrir harus menerima dialoh dengan pemerintah Belanda dan mau menerima pemikiran federal yang ditawarkan dalam konferensi Linggarjati. Hal ini menurut penulis bahwa keputusan itu diambil karena Sjahrir memperhitungkan secara matang kondisi keamanan dari rakyat Indonesia yang selalu menjadi sasaran teror dari militer Belanda maupun sekutu, sehingga jalan terbaik saat itu adalah diplomasi politik sebagai salah satu taktik perjuangan. Disisi yang lain, diplomasi tersebut bisa berjalan dengan lebih langgeng

karena adanya persamaan ideologi antara Sjahrir dengan partai yang memerintah saat itu di Negeri Belanda sehingga secara psikologi turut mempengaruhi aktivitas perjuangan dari Sjahrir. Yang diperhitungkan Sjahrir pada waktu itu adalah pengakuan atas eksistensi Republik sebab tanpa pengakuan itu, sulit bagi Republik untuk ikut serta dalam pergaulan dunia internasional. Adanya perjanjian itu berarti Belanda telah melakukan pengakuan akan eksistensi Republik Indonesia sebagai sebuah negara baru.

### **C. Sikap Kaum Nasionalis Maluku terhadap Perjanjian Linggarjati**

Sementara Perjanjian Linggarjati berlangsung, banyak kaum nasionalis Maluku yang mencermati jalannya proses-proses politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Republik Indonesia. Reaksi yang muncul di Ambon terhadap proses perjanjian Linggarjati dari para kaum nasionalis terutama Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang dimuat dalam surat kabar *Negar Baru* tanggal 24 Pebruari 1947 bahwa; “Ambon setuju dengan Negara Indonesia Timur tetapi menentang terpisah dari Republik Indonesia (*Negara Baroe*, 24 Pebruari 1947).

Dari sumber tersebut menunjukkan bahwa selama perundingan linggarjati berjalan, telah ada rencana dari van Mook untuk mendirikan negara-negara bagian termasuk Indonesia Timur sehingga Reaksi yang timbul di Maluku terhadap rencana pembentukan Negara Indonesia Timur ditanggapi oleh kaum nasionalis di Kota Ambon dengan sikap hati-hati dan diikuti secara cermat. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi terutama tindakan pihak Belanda setelah persetujuan Linggarjati disetujui dan rencana pembentukan negara bagian itu direalisasikan maka, pada tanggal 16 Pebruari 1947 Partai Indonesia Merdeka di Ambon telah mengadakan suatu rapat umum yang dihadiri kurang lebih 500 orang pengurus, termasuk cabang-cabangnya diseluruh negeri dan para anggotanya (*Negara Baroe*, 24 Pebruari 1947).

Dalam rapat tersebut dibicarakan persetujuan linggarjati secara detail dan peserta rapat setuju dengan rencana pembentukan Negara Indonesia Timur tetapi mereka menentang dengan keras kalau Maluku dipisahkan dari Republik Indonesia. Pimpinan Partai Indonesia Merdeka E. U. Pupella mengatakan dalam rapat tersebut bahwa satu hari sebelum rapat dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Pebruari 1947 telah diadakan rapat anggota dan 75% dari anggota menyatakan untuk tetap berada dalam lingkungan negara Republik Indonesia (*Negara Baroe*, 24 Pebruari 1947). Di kota Piru Seram Barat pada tanggal 2 April 1947 telah dilangsungkan suatu rapat untuk membicarakan hasil dari konferensi Linggarjati yang diikuti oleh wakil-wakil dari seluruh lapisan masyarakat dan terutama para raja yang berasal dari seluruh negeri-negeri di wilayah *onderafdeling*.

Turut hadir dalam pertemuan itu pimpinan *onderafdeling* Seram Barat, Kontrolir tuan Bartsra yang menjelaskan tentang persetujuan Linggarjati kepada peserta rapat dan mereka setuju dengan pembentukan Negara Indonesia Timur tetapi tetap berada dalam Republik Indonesia (*Negara Baroe*, 3 April 1947). juga menulis bahwa Dewan Maluku Selatan pada tanggal 31 Maret 1947 dalam suatu persidangan dari Dewan Maluku Selatan di Amboina yang dipimpin oleh Residen Pissers, ia telah mengumumkan kepada anggota-anggota Dewan Maluku Selatan tentang penerimaan persetujuan linggarjati di Batavia oleh pihak Republik Indonesia. Setelah selesai sidang dilanjutkan dengan pertemuan istimewa yang dihadiri oleh seluruh raja-raja dan pembesar marine dan tentara. Residen berpidato dengan menggunakan bahasa Belanda dan Indonesia mengenai persetujuan Linggarjati dalam pertemuan istimewa itu (*Negara Baroe*, 3 April 1947).

Upaya van Mook untuk mendirikan negara-negara bagian ini mendapat reaksi keras dari berbagai masyarakat diseluruh tanah air Republik Indonesia yang baru diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun reaksi dari berbagai kaum nasionalis di berbagai daerah, namun bagi van Mook adanya perundingan dengan Republik melalui Komisi Jenderal berarti mengalihkan perhatian Republik dari daerah-daerah di luar Jawa, khususnya Kalimantan dan Timur Besar (*si*). Dengan begitu van Mook memainkan dua strategi sekaligus, di satu pihak mengulur-ulur pengakuan eksistensi tanpa pengakuan kedaulatan kepada Republik untuk Jawa dan Sumatra, dan di pihak lain berusaha mengembalikan kekuasaan atau setidaknya pengaruh kuat Belanda di luar kedua wilayah tersebut. Dengan demikian negara federal yang akan dibentuk itu tidak lain adalah menerapkan desentralisasi di bawah pengawasan Belanda.

Dengan sistem *federal* diharapkan Republik akan terjepit dan menjadi tidak berdaya di tengah negara-negara bagian yang sangat tergantung pada Belanda. Untuk maksud itu diperlukan kehadiran tentara Belanda untuk jangka waktu tertentu agar sistem federal itu bisa bertahan dan menjadi nampak sesuai dengan keinginan Belanda atau berorientasi secara penuh kepada Belanda. Dipermukaan yang memerintah adalah bangsa Indonesia, namun di dalamnya sebenarnya menjalankan desain politik Belanda. Untuk mendukung semua rencana yang telah diprogramkan maka van Mook melakukan mobilisasi umum dan mulai mengirim tentaranya secara besar-besaran dari negara Belanda (Leirissa, 1975: 138).

Perhatian pertama dari van Mook mendirikan negara bagian yang dipakai sebagai alat untuk menandingi Republik adalah wilayah Indonesia Timur. Di daerah ini memang ada sejumlah penduduk yang memihak pada Belanda karean kedudukan Belanda di sana sangat kuat. Sejak tentara sekutu meninggalkan daerah ini pada bulan 1946, van Mook telah membentuk *Algemeen Reggerings Commissaris* (ARC) yang bertugas menjalankan pemerintahan sipil menggantikan *Chief Officers*,

dan *Staff Officers* dari NICA (Leirissa, 1975: 139). Agar semua rencana van Mook itu bisa berjalan dengan lancar, ia mengumumkan undang-undang keadaan bahaya di seluruh wilayah Indonesia Timur. Ini berarti semua aturan militer yang telah dibuat oleh NICA tetap dipertahankan, sekalipun banyak pegawai-pegawai Belanda yang digantikan oleh Penduduk di daerah itu (Leirissa, 1975: 139).

Van Mook lebih lega lagi ketika Hasil Sidang Pleno Komite Nasional Pusat di Solo (Pebruari-Maret 1946) yang akhirnya menunjuk lagi Sjahrir sebagai perdana menteri, karena Sjahrir dianggap dapat diajak berunding. Selain itu dapat mengalihkan perhatian Republik dari masalah militer ke masalah diplomasi sebagai kunci sukses. Dengan situasi itu van Mook bisa juga memainkan strategi yang lain yaitu dengan diam-diam ia mengadakan konsolidasi di Kalimantan dan Indonesia Timur dengan sasaran melakukan beberapa pertemuan penting yaitu konferensi Malino, Pangkal Pinag, dan konferensi Denpasar.

#### **4. Simpulan**

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum nasionalis Maluku memiliki pandangan yang berseberangan dengan van Mook terkait dengan masa depan negara Indonesia. Rencana pembentukan Negara Indonesia Timur mendapat penentangan dari kaum nasionalis yang menginginkan Maluku sebagai bagian dari Republik Indonesia. Meskipun pada akhirnya Maluku dijadikan sebagai bagian dari Negara Indonesia Timur, namun dalam parlemen terjadi perdebatan yang menunjukkan keteguhan prinsip untuk tetap sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sikap tersebut kemudian sangat memengaruhi bagi kondisi politik di Maluku sampai pada pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS).

#### **Daftar Sumber**

- Algemeen Rijksarchief. *Tweede Afdeling Reportage Indonesia 1945-1950 No: 770*.
- Groen, P. M. H. 1991. *Marsouters en Dwaalsporren: het Ned. Militaerstrate-gischbeleid in Indonesia 1945-1950*. s'Gravenhage: SDU Uitgeverij.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Lapian, A. B. dan P. S Droogrever, 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leirissa, R. Z. 1975. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta : Lembaga Sastra Sejarah Universitas Indonesia.
- Cheong, Jong Moon. 1982. *H.J. van Mook and Indonesian Independence; A study of his role in Dutch Indonesi Relatins, 1945-1948*. The Hague: Marthinus Nijhoff.
- Margarets, George. 1986. *Australia and The Indonesian Revolution*. Melbourne: Melbourne University Press.
- van Mook, H. J. 1949. *Indonesia Nederland en de Wereld*. Amsterdam: Bandung de Bizege By,
- Zara M., Yuanda. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946: Mengungkap Kudeta Pertama Dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Buku Kita.
- Negara Baroe*, 8 Februari 1947; 24 Pebruari 1947; 3 April 1947